

# **DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH JEMBATAN SURAMADU**

(Studi Di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)

**Ananda Tri Dharma Yanti<sup>1</sup>, Mochammad Saleh Soeaidy<sup>1</sup>, Heru Ribawanto<sup>1</sup>**  
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
e-mail: nand\_3dy@yahoo.co.id

**Abstract:** *The Development Policy Impact of Suramadu bridge on Socio-Economic Community In Suramadu bridge Regional Development part of Madura (Studies in the Sukolilo Barat Village, Labang subdistrict, Bangkalan district). This study aims to describe and analyze the impact of Suramadu bridge development on the socio- economicand correlation in the development of the Suramadu bridgeregional particularry part of Madura in Sukolilo Barat Village, Labang subdistrict, Bangkalan District. Research method used is descriptive qualitative research approach, with a focus on 1. Development impact of Suramadu bridge on socio-economic community in Sukolilo barat Village, Labang subdistrict, Bangkalan district, includes the impact on social and economic ; 2. correlation the socio-economic impact withregional development policies Suramadu bridge part of Madura; 3. evaluation of development policy Suramadu bridge regional part of Madura views of the effectiveness, , efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy.*

**Keywords:** *Impact of Policies, Suramadu bridge, Suramadu Regional Development*

**Abstrak:** **Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (Studi Di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan).** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pembangunan Jembatan Suramadu terhadap sosial ekonomi dan keterkaitannya dalam pengembangan wilayah Jembatan Suramadu khususnya sisi Madura di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian 1. Dampak pembangunan jembatan suramadu terhadap sosial ekonomi masyarakat di desa sukolilo barat kecamatan labang kabupaten bangkalan meliputi dampak dalam bidang sosial dan dampak dalam bidang ekonomi; 2. Keterkaitan dampak sosial ekonomi dengan kebijakan pengembangan wilayah jembatan suramadu sisi Madura; 3. Evaluasi kebijakan pengembangan wilayah jembatan suramadu sisi madura dilihat dari efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan.

**Kata Kunci:** Dampak Kebijakan, Jembatan Suramadu, Pengembangan Wilayah Suramadu

---

## **Pendahuluan**

Kebijakan pembangunan jembatan Suramadu sebagai salah bentuk infrastruktur transportasi secara esensial dapat merangsang dan memberi peluang pertumbuhan sosial maupun ekonomi khususnya di Pulau Madura. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah kebijakan pengembangan wilayah Jembatan

Suramadu yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi daerah terdampak. Dalam hal ini peneliti mengambil studi Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan mengingat daerah ini lokasinya dekat dengan Jembatan Suramadu.

Berdasarkan masalah tersebut pemerintah membentuk sebuah badan

pelaksana yakni Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Kebijakan pembentukan BPWS ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 23 tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. BPWS yang baru dibentuk pada tahun 2010 oleh pemerintah pusat ini bersifat *ad hoc*/sementara mempunyai visi yakni terwujudnya wilayah suramadu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan sebagai simpul transportasi nasional yang tetap dapat mempertahankan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam mewujudkan visinya tersebut BPWS bekerjasama oleh pemerintah daerah kabupaten di Madura. Salah satu Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bangkalan yang sekaligus juga merupakan wilayah pengembangan Jembatan Suramadu. Dengan demikian hal ini tentu akan dapat menstimulasi peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

## Kajian Pustaka

### 1. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan dapat digambarkan salah satunya melalui model pertumbuhan. Model pertumbuhan yang diungkapkan oleh Rostow merupakan “suatu konsep yang memandang pembangunan dari sudut ekonomi dan sosial. Kenaikan pendapatan per-kapita penduduk suatu Negara merupakan sebuah realita dan perwujudan pembangunan”. Menurut Rostow yang dikutip oleh Budiman beberapa tahapan proses pembangunan tersebut meliputi “masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, tinggal landas, bergerak ke kedewasaan dan konsumsi massa tinggi” (Budiman, 1995, h.26)

### 2. Pembangunan terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

Pembangunan akan berpengaruh pada perubahan sosial. Dalam proses perubahan sosial masyarakat terdapat faktor pendorong dan penghambat. Berikut adalah beberapa faktor pendorong dalam perubahan sosial menurut Soekanto meliputi:

1. Kontak dengan budaya lain.
2. Sistem pendidikan yang maju.

3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju.
4. Toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang.
5. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan.
6. Penduduk yang heterogen.
7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
8. Orientasi ke masa depan.
9. Nilai bahwa manusia selalu beikhtiar untuk memperbaiki hidup (Soekanto, 1987, h.20).

Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial, menurut Soekanto meliputi:

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
3. Sikap masyarakat yang tradisional.
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat.
5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.
6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing.
7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
8. Adat atau kebiasaan
9. Nilai bahwa pada hakikatnya hidup ini tidak mungkin akan diperbaiki (Soekanto, 1987, h.20).

Lebih lanjut lagi, Kodoatie menjelaskan tentang dampak pembangunan transportasi jalan dengan perubahan ekonomi adalah sebagai berikut:

“Secara umum, tidak ada satu teoripun yang menyatakan tentang hubungan antara pembangunan transportasi jalan dengan perubahan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, keberadaan jalan dan fasilitas transportasi lainnya pada tingkat tertentu akan secara esensial merangsang dan memberi peluang pertumbuhan ekonomi” (Kodoatie, 2005, h.268).

Lebih lanjut lagi, menurut Thengsen yang dikutip oleh Kodoatie juga mengungkapkan bahwa:

“Investasi pada jaringan jalan utama di negara berkembang hanya akan mengarah pada mereduksi biaya operasi kendaraan dan waktu tempu perjalanan saja, tetapi jarang berpengaruh terhadap pembangunan

ekonomi secara signifikan. Kecuali untuk daerah-daerah terisolir dihubungkan dengan jalan utama. Investasi pada jalan penghubung pedesaan yang membuka daerah terisolir atau mampu mereduksi biaya transportasi secara dramatis sering memiliki peluang lebih besar membangkitkan pembangunan ekonomi” (Kodoatie, 2005, h.269).

### 3. Dampak Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang” (KBBI, 2001, h.849). Lebih lanjut lagi, dampak kebijakan menurut Winarno adalah sebagai berikut:

“Dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. Dalam hal ini ada dua kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan yaitu dampak yang diinginkan (berkonotasi positif) dan dampak yang tidak diinginkan (berkonotasi negatif). Dampak kebijakan juga dibedakan antara *Policy Impact Outcomes* dan *Policy Output*. *Policy Out Comes* adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilakukannya suatu kebijakan. Sedangkan *Policy Output* adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan dari pengertian ini, maka dampak mengacu pada adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan” (Winarno, 2007, h.23).

Menurut Parsons yang dikutip oleh Ardyasworo bahwa ada tujuh metode dalam upaya mengetahui dampak kebijakan antara lain:

1. Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi.
2. Melakukan eksperimen untuk mengkaji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi.

3. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi.
4. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu.
5. Pendekatan kualitatif dan *jugmental* untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program.
6. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan.
7. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi (Ardyasworo, 2011, h.43).

### 4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik (*public policy evaluation*) dalam studi kebijakan publik (*public policy study*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*). Menurut Mustopadijaja yang dikutip oleh Widodo evaluasi merupakan “kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu” (Widodo, 2012, h.111). Menurut Widodo untuk melakukan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan :

- a. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan.
- c. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program.
- d. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, data dicari di lapangan.
- e. Hasil data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan (Widodo, 2012, h.125). Kriteria / indikator evaluasi menurut Dunn sebagai berikut:

#### Tabel. 2 Indikator Evaluasi Kebijakan

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
<b>Efektivitas</b>	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ?
<b>Efisiensi</b>	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?
<b>Kecukupan</b>	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan Masalah?
<b>Pemerataan</b>	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?
<b>Responsifitas</b>	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?
<b>Ketepatan</b>	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna?

Sumber: William Dunn (2000, h.61)

### Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada” (Moleong, 2005, h.5). Fokus dalam penelitian ini adalah: 1. Dampak kebijakan pengembangan Jembatan Suramadu terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan; 2. Keterkaitan dampak kebijakan pembangunan Jembatan Suramadu dengan pengembangan wilayah Jembatan Suramadu; 3. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura.

### Hasil dan pembahasan

#### 1. Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sukolilo Barat

#### Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

Kebijakan pembangunan jembatan Suramadu membuat dampak baik itu dalam aspek sosial maupun ekonomi masyarakat di Madura termasuk bagi Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Hal ini karena dalam setiap kebijakan yang dibuat pasti akan menimbulkan efek-efek atau konsekuensi disebut sebagai dampak kebijakan. Dampak kebijakan menurut Winarno adalah sebagai berikut:

“Dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. Dalam hal ini ada dua kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan yaitu dampak yang diinginkan (berkonotasi positif) dan dampak yang tidak diinginkan (berkonotasi negatif). Dampak kebijakan juga dibedakan antara *Policy Impact Outcomes* dan *Policy Output*. *Policy Out Comes* adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilakukannya suatu kebijakan. Sedangkan *Policy Output* adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan dari pengertian ini, maka dampak mengacu pada adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan” (Winarno, 2007, h.23).

#### 2. Dampak Dalam Bidang Sosial

##### a. Dampak Dalam Bidang Mobilitas Sosial

Jembatan Suramadu merupakan sebuah anugerah karena langsung menghubungkan ke daerah perkotaan yakni kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang mempunyai kelengkapan akses kebutuhan hidup. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah memasok akses kebutuhan hidupnya karena adanya jembatan Suramadu. Sedangkan dampak negatif berkaitan dengan semakin banyaknya

peredaran narkoba, kriminalitas dan lokalisasi.

Melihat model pertumbuhan Rostow yang dikutip oleh Budiman (1995, h.26) dalam konsep pembangunan, dapat dikatakan bahwa intervensi pemerintah dalam pembangunan jembatan Suramadu membuat masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang ini menjadi masyarakat yang naik level menjadi masyarakat pra kondisi lepas landas. Hal ini karena intervensi pemerintah dalam pembangunan mengakibatkan kemajuan dalam mobilitas sosial.

#### **b. Dampak Dalam Bidang Pendidikan**

Dampak pembangunan jembatan Suramadu dari segi pendidikan membawa dampak yang positif bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yakni muncul dua sekolah negeri baru yakni SMK dan SMP. Terlihat bahwa ada usaha untuk membangun SDM yang berkualitas sehingga masyarakat menjadi pelaksana dalam pembangunan di daerahnya sendiri sebagai persiapan ketika kawasan Suramadu di kembangkan lebih baik.

Dampak positif lain adalah masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang yang mendapatkan *training*, workshop dan sosialisasi khususnya kepada nelayan dalam rangka membangun SDM berkualitas yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Dengan demikian jika melihat model pertumbuhan Rostow yang dikutip oleh Budiman (1995, h.26) dalam konsep pembangunan, dapat dikatakan bahwa intervensi pemerintah dalam pembangunan jembatan Suramadu membuat masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang ini menjadi masyarakat yang naik level menjadi masyarakat pra kondisi lepas landas. Hal ini karena intervensi pemerintah dalam pembangunan mengakibatkan sedikit kemajuan pada wawasan dan pengetahuan masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Selain itu, jika melihat pada dampak sosial pembangunan infrastruktur secara langsung juga dapat mempengaruhi perubahan sosial seperti yang diungkapkan Soekanto (1987, h.20) bahwa pendidikan

yang maju dan berorientasi pada masa depan juga menjadi faktor pendorong dalam perubahan sosial yang ada di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

### **3. Dampak Dalam Bidang Budaya**

Dampak positif adanya Jembatan Suramadu berkaitan dengan mulai berubahnya status di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dari daerah plosok menjadi daerah yang lebih hidup. Selain itu, terdapat kerjasama budaya antar suku Madura dengan suku Jawa yakni kirab dan lomba perahu hias di daerah pesisir dekat Jembatan Suramadu untuk memperingati Hari Raya Ketupat. Hal ini menjadi sebuah salah satu perubahan budaya karena sebelum ada Jembatan Suramadu hanya diadakan oleh orang Madura saja. Dampak negatif berkaitan tatanan nilai dan budaya dalam masyarakat yang berbasis nilai agama menjadi semakin luntur.

Dampak sosial pembangunan infrastruktur secara langsung juga dapat mempengaruhi perubahan sosial seperti yang diungkapkan Soekanto (1987, h.20) dalam hal ini yakni berhubungan dengan adanya kontak kebudayaan lain, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju serta sistem yang terbuka dalam lapisan-lapisan juga menjadi faktor pendorong dalam perubahan sosial yang ada di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

### **4. Dampak Dalam Bidang Ekonomi**

#### **a. Dampak Dalam Bidang Kelancaran Arus Transportasi**

Adanya pembangunan jembatan Suramadu membawa dampak positif bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Arus transportasi semakin lancar sehingga mempermudah masyarakat untuk menyebrang dan mendistribusikan barang/jasa ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Waktu dan biaya dalam distribusi barang/jasa semakin efektif dan efisien.

#### **b. Dampak Dalam Bidang Kegiatan Ekonomi Masyarakat**

Adanya pembangunan jembatan Suramadu bukan hanya membawa dampak positif. Akan tetapi juga membawa dampak negatif bagi kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Jembatan Suramadu membuat mereka yang aktif dan kreatif mempunyai pekerjaan yang baru. Sedangkan bagi mereka yang kurang aktif menjadi korban akibat adanya pembangunan jembatan Suramadu.

#### **c. Dampak Dalam Bidang Tingkat Pendapatan Masyarakat**

Adanya pembangunan jembatan Suramadu bukan hanya membawa dampak positif. Akan tetapi juga membawa dampak negatif terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Jembatan Suramadu membuat mereka yang aktif dan kreatif mempunyai pekerjaan yang baru yang juga berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Sedangkan bagi mereka yang kurang aktif dan kreatif dalam menyiasati keadaan mengakibatkan penurunan terhadap pendapatan mereka.

#### **5. Keterkaitan Dampak Sosial Ekonomi Dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura**

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang mempunyai sumber daya personel berstatus tenaga profesional dan anggaran yang memadai dari APBN. BPWS bertugas untuk mengembangkan wilayah kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura maupun sisi Surabaya. Dan mengembangkan wilayah Madura secara keseluruhan. Selain itu terdapat kebijakan dan strategi dalam mencapai realisasi pengembangan wilayah jembatan Suramadu yang disesuaikan dengan sosial ekonomi di daerah terdampak sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tepat sasaran.

#### **6. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura**

##### **a. Efektifitas Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura**

Efektifitas dalam evaluasi menekankan pada pertanyaan “apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?”. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu sebagai Badan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pengembangan wilayah Jembatan Suramadu sudah berusaha untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yakni terbukti dengan berjalannya penyelesaian program tahun 2011-2012 yakni:

- Desain Pembangunan rest area di lahan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) seluas 40 ha dan rencana pembangunan masjid ikon Madura di pintu masuk KKJSM.
- Penjajagan dan promosi investasi dengan pihak asing terus diretas. Diantaranya dengan Gubernur Provinsi Okinawa Jepang, China dan sejumlah Negara manca Asia Negara lainnya.
- Pemetaan Potensi Wilayah.
- Konsultasi Publik.
- Program Pemberdayaan Masyarakat, seperti: Pelatihan UMKM, Pelatihan Pemanfaatan Hutan Mangrove, Pelatihan Kriya Logam, Pelatihan IT untuk pondok pesantren, dll.

Namun demikian hasil yang diinginkan belum sepenuhnya membuahkan hasil khususnya dalam penjajagan investasi. Hal ini menunjukkan kebijakan pengembangan wilayah jembatan suramadu sisi Madura kurang efektif.

##### **b. Efisiensi Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura**

Efisiensi dalam evaluasi menekankan pertanyaan “seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?”. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu sebagai Badan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pengembangan wilayah Jembatan Suramadu telah berusaha membuat kebijakan dan strategi dengan sedemikian rupa agar menjadi efisien. Target yang

ditetapkan BPWS dalam pencapaian hasil yakni kurang lebih 20-35 tahun.

**c. Kecukupan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura**

Kecukupan dalam evaluasi menekankan pertanyaan “Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?”. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu sebagai Badan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pengembangan wilayah Jembatan Suramadu telah cukup membuahkan hasil yakni dengan memberdayakan SDM di Madura termasuk Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyiapkan mereka untuk menjadi *leader* ketika memasuki era industrialisasi. Sedangkan pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu masih mengalami kemacetan karena kendala pengadaan lahan.

**d. Pemerataan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura**

Pemerataan dalam evaluasi menekankan pertanyaan “apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?”. Tujuan dari Jembatan Suramadu yang salah satunya ingin mewujudkan pemerataan perekonomian khususnya di Pulau Madura belum sepenuhnya berhasil. Hal ini terbukti dengan masyarakat Madura khususnya di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan masih banyak melakukan urbanisasi ke kota Surabaya untuk mencari pekerjaan yang rata-rata menjadi buruh Industri.

**e. Responsifitas Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura**

Responsifitas dalam evaluasi menekankan pada pertanyaan “apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?”. Pencurian infrastruktur di kawasan kaki jembatan Suramadu merupakan bentuk responsifitas negatif dari masyarakat. Responsifitas yang negatif ini merupakan

bukti bahwa pemerataan dalam kebijakan pengembangan wilayah jembatan Suramadu belum berhasil.

**f. Ketepatan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura**

Ketepatan dalam evaluasi menekankan pertanyaan “apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna?”. Kebijakan pengembangan wilayah Jembatan Suramadu sisi Madura ini sudah tepat. Hal ini karena kebijakannya yang mengacu pada kondisi sosial ekonomi daerah terdampak sehingga berguna bagi masyarakat.

**Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan kesimpulan dan saran-saran yang dapat memberi masukan baik pada masyarakat maupun instansi pemerintah terkait.

**Kesimpulan**

Kebijakan pembangunan jembatan Suramadu merupakan sebuah upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang kompleks. Dampak kebijakan pembangunan jembatan suramadu terhadap sosial ekonomi masyarakat yakni bersifat positif dan negatif. Intervensi pemerintah dalam upaya menstimulasi peningkatan sosial maupun ekonomi di Madura pada khususnya yakni dengan membentuk Badan pengembangan wilayah jembatan Suramadu (BPWS) dengan strategi dan kebijakan mengacu pada kondisi, nilai-nilai dan budaya Madura sehingga tidak termajinalkan. Dalam hal ini peneliti memberikan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan wilayah Jembatan Suramadu dengan hasil bahwa kebijakan tersebut belum maksimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

**Saran**

1. Masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan seharusnya lebih mempunyai motivasi yang kuat dalam

- meningkatkan pendidikan untuk menghadapi era industrialisasi.
2. Wisata daerah pantai sangat berpotensi baik itu dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat. Dalam hal ini wisata laut bernuansa edukasi sejarah Jembatan Suramadu bisa dipertimbangkan.
  3. Dibutuhkan pendekatan secara khusus ketika bernegosiasi dengan masyarakat Madura tentang pembelian lahan mengingat kepribadian masyarakat Madura yang sedikit temperamental dan keras kepala.
  4. Dibutuhkan pengawasan secara khusus untuk masalah pencurian infrastruktur yakni dengan memperketat penjagaan.
  5. Untuk menghindari terjadinya konflik BPWS khususnya berkenaan dengan dinamika politik yakni dalam setiap mengambil kebijakan dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga mengurangi rasa kecurigaan.
- 

### Daftar Pustaka

- Ardyasworo, Sri W.P. (2011) **Dampak Sosial Ekonomi Dari Kebijakan Pembangunan Pariwisata**. Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
- Budiman, Arief. (1995) **Teori Pembangunan Dunia Ketiga**. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William. (2000) **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta. UGM Press
- Keban, Yermis T. (2004) **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep Teori Dan Isu**. Yogyakarta. Gava Media.
- Kodoatie, J. Robert. (2005) **Pengantar Manajemen Infrastruktur**. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Moleong, Lexy J. (2005) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (1987) **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta. Rajawali Press.
- Widodo, Joko. (2006) **Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik**. Malang. Bayu Media.
- Winarno, Rudi. (2007) **Kebijakan Publik: Teori dan Proses**. Yogyakarta. Media Pressindo.